

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Brotodihardjo, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Diaz Priantara, *Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak: Prosedur, Formulir, dan Trik-Trik yang Harus Diketahui Wajib Pajak agar Terhindar dari Kekeliruan*, Cetakan Pertama, Permata Puri Media, Jakarta, 2009.
- Dwikora H.S., *Perpajakan Indonesia: sebagai materi perkuliahan di perguruan tinggi*, Cetakan Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2019.
- HS, Salim., *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT)*, Edisi 1 Cetakan 2, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- Hutomo, Sigit, *Pajak Penghasilan Konsep dan Aplikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Beserta Pelaksanaannya*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.
- Mardiasmo, *Perpajakan: Edisi Revisi 2009*, Andi Offset, Yogyakarta, 2009.
- Mustofa, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Penerbit Karya Media, Yogyakarta, 2017.
- Notodisoerojo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Pahala Siahaan, Marihot, *Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Pahala Siahaan, Marihot, *Hukum Pajak Formal Pendaftaran, Pembayaran, Pelaporan, Penetapan, Penagihan, Penyelesaian Sengketa, dan Tindak Pidana Pajak*, Cetakan 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Pahala Siahaan, Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, Rajagrafindo Persada, Yogyakarta, 2010.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Soemardjono, Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Sugeng, Bambang & Sujayadi., *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika offset, Jakarta, 2011.

Wibawanti, Erna Sri dan R. Murjiyanto, *Hak atas Tanah dan Peralihannya*. Liberty, Yogyakarta, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).

Jurnal

Arifin, Melissa dan Tunjung Herning Sitabuna, “Sistem Perpajakan di Indonesia”, SERINA IV Universitas Tarumanegara, 20 April 2022.

Dumamanauw, Delicia A & Nelson, Mutiara F., Hubungan Hukum yang Timbul Dalam Penitipan Uang Pajak Jual Beli Tanah Kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah, *Jurnal Kentha Semaya*, Volume 11 Nomor 8.

Ellryz, Rubby, “Peran Notaris dalam Mencegah Wajib Pajak Melakukan *Tax Avoidance* Melalui Manipulasi Hibah”, *Indonesian Notary*, Vol. 2, Article 33.

Hidayat., Riyan, “Kewenangan Notaris/PPAT dalam Menerima Penitipan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 Nomor 3, PT. Nindya Karya (Persero) Wilayah IV, Kota Denpasar, Bali, (2018).

Khusna, Yuliana Zamrotul, dan Lathifah Hanim, “Peran Notaris Dan PPAT Dalam Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Kuasa Jual Untuk Penghindaran Pajak”, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No.3, (2017).

Limbong, Tania Mayshara, dkk, “Tanggung Jawab PPAT Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pada Akta Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kota Medan”, *Jurnal Law*, Vol. III, No. I, (2022).

M, Muhammad Fadli & Budi Ispriyarso., Peran PPAT Terhadap Aspek Perpajakan Dalam Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan, *Jurnal Notarius*, Volume 15 Nomor 1, 2022.

Internet

KBBI Daring, “Pengertian Kuasa”, <https://kbbi.web.id/kuasa> , diakses pada tanggal 8 April 2024.

Nia Sita Mahisa, “Sahkan Jual Beli Tanah dan Bangunan Jika Bangunannya Ternyata Milik Pihak Ketiga?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkan-jual-beli-tanah-bangunan-jika-bangunannya-ternyata-milik-pihak-ketiga-lt60e2745914b74/> , diakses pada tanggal 9 April 2024.

Tesis

Ahmad Muzakki, “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Notaris/Pejabat pembuat Akta Tanah dalam Hal Pelayanan Pembayaran Pajak Penjual (PPh) dan Pajak Pembeli (BPHTB) di Kabupaten Indramayu”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, 2019.

Faaza Lailinisa, “Akibat Hukum Bagi Notaris yang Menerima Penitipan Pembayaran Objek dalam Akta Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 508 K/Pid/2017)”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas, 2019.

Wilimantara, Made Panji, “Implementasi Pemberlakuan Validasi Pajak Penghasilan Pada Proses Jual Beli Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 dan PER-26/PJ/2018 di Cikarang Utara Kabupaten Bekasi”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Lainnya

I.P, Agung Herning, *Pemberian Kuasa*, Handout Mata Kuliah Teknik Pembuatan Akta 2.

R, Ikhwan Catur & Eko Susanto., Seminar Nasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta berjudul “e-PHTB dan e-BPHTB pada Proses Validasi Pajak Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan”, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 18 November 2023.